

DAFTAR REFERENSI

A. Buku-Buku

- Achmad Ali, (2015), Menguak Tabir Hukum, Prenada Media Group, Jakarta.
- Adnan Hamid, (2012), Menuju Kebijakan yang Adil Bagi Pekerja Migran, Jakarta: FHUP Press.
- Ahmad Rifai, (2018), Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta, Sinar Grafika.
- Achmad Rifai, (2020), Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Menciderai Keadilan Masyarakat, Makasar, Nas Media Pustaka.
- Adami Chazawi, (2014), Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta
- Andi Hamzah, (2004) , Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, (1990) Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan. pertama, Jakarta,CV. Rajawali.
- Boedi Prayitno (2017), Hasil Penelitian Keimigrasian, Jakarta, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- C Djisman Samosir, (2014), Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasaryakatan, Bandung, Nuansa Aulia
- E. Caroline, (2019), Kajian dan Kebijakan Migrasi Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah, Surabaya, Media Sahabat Cendekia.
- Eddy O.S (2016) Prinsip Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Edi Hardum S, (2016) Perdagangan Manusia Berkedok TKI, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Hadi Subhan, (2012) Perlindungan TKI Pada Masa Pra Penempatan Selama Penempatan dan Purna Penempatan, Jakarta, BPHN Kementerian Hukum dan HAM,)
- Harjono, (2008) Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, (1980),Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Harapan.
- Imam Anshori Saleh, (2014), Konsep Pengawasan Kehakiman, Setara Press, Malang.
- Ismantoro Dwi Yuwono, (2013) Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, Medpress Digital, Yogyakarta.
- Muladi. (1985) Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Moeljatno. (1993) Asas - Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta.

- Nazaruddin Malik, (2016), *Dinamika Pasar Tenaga Kerja Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Saksono, Slamet. (2011), *Administrasi Kepegawaian*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ruth Rosenberg, (2003) *Perdagangan Perempuan dan Anak Indonesia*, Jakarta.
- R.M. Moch Wispandono, (2018), *Buku Ajar Menguak Perempuan Pekerja Migran*, Yogyakarta, Deepublish Publisher All Right Reserved.
- Redaksi Sinar Grafika, (2013) *KUHAP Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketujuh
- Sudarto, (1986), *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2001) *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tri Andrisman, (2007) *Hukum Pidana*, Bandar Lampung.
- Peter Mahmud Marzuki, (2016), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta.
- Zainudin Ali, (2016), *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Skripsi

- Romando paulus putra formasio situmorang, (2021) “analisis yuridis perlindungan hukum bagi pekerja migran terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan mengeksploitasi diluar wilayah negara indonesia ditinjau dari pasal 4 undang-undang no. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan”.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor: 367/Pid.sus/2019/Pn.Btm

Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2022/PN.Tpg

D. Jurnal-Jurnal

- Dewi Asri Puanandini, (2020), *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia*, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan , Vol. 12. No.2. hlm.274 Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara.
- Devi Pratiwi dkk, (2021), *Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tanpa Izin Resmi (Tinjauan Putusan Nomor 1047/Pid.B/2018/Pn-Mdn)*, Jurnal Transparansi Hukum.
- Henny Nuraeni, (2015) *Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan*

- Orang”, Universitas Suryakencana, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 4 No 3, November.
- Romando Paulus Putra Formasio Situmorang, (2021) “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Mengeksploitasi Diluar Wilayah Negara Indonesia Ditinjau Dari Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan,”.
- Rosalina, Henny Natasha, and Lazarus Tri Setyawanta, (2020), “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal Dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum Di Masyarakat.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2: 174–87. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.174-187>.
- Rahayu, Devi. (2011), “Perlindungan Hukum Bagi Buruh Migran Terhadap Tindakan Perdagangan Perempuan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 1: 115–36. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art7>.
- Safrida Yusitarani dkk, (2020), *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia oleh Pemerintah Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Salsa, Shidqi Noer, (2021, Kejaksaan Agung, and Republik Indonesia. “Kejahatan Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional Menurut Teori Diskriminasi Dan Pidanaan.” *Jurnal Law Retrieval* vol.1 no.1).
- Sofia Azmi dkk (2019), "Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah", (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 31." 3, no. 727): 1–9.
- Solang, Margaretha, (2011 “Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Perlindungan Hak Dan Keselamatan Pekerja Migran.” *Undang-Undang Republik Nomor 5 Tahun 2011*, no. 8): 1–6.
- Johari, Kebenaran Materil dalam kajian Hukum Pidana, Aceh, Unversitas Malikussaleh, Jurnal Ilmu Hukum reusam, 2020, Vol VIII No 2.

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

E. Website

Kedutaan RI Tajikistan, (2022), “Letak Geografis,” Kemenlu.go.id, <https://kemlu.go.id/nur-sultan/id/pages/geografi/41/etc-menu#:~:text=Wilayah Indonesia terletak pada posisi,Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.>

Redaksi Tim (2022), <https://voi.id/berita/123026/polda-kepri-tangkap-tersangka-pengirim-pekerja-migran-ilegal-yang-kapalnya-karam-di-malaysia.>

Tajikistan, (nd), Kedutaan RI. “Letak Geografis.” Kemenlu.go.id, <https://kemlu.go.id/nur-sultan/id/pages/geografi/41/etc-menu#:~:text=Wilayah Indonesia terletak pada posisi,Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.>

